KIBAR JUANG

MINGGU II MEI 2013

Rp 2.500,00
(Rp 500 dana konsolidasi)

KEKUATAN
Menumbuhkan Kesadaran Politik Kelas Buruh dengan 'SEKOLAH EKONOMI-POLITIK'
Dari pengalaman Danial Indrakusuma.. hal 12

INTERNASIONALE
Hanya dalam Sosialisme, Kemanusiaan Dihargai
Pelajaran dari Kuba, negeri kecil, miskin dan penentang kapitalisme
.. hal 8

TINTA MERAH
Sosialisme dalam Kemerdekaan Nasional (1945) .. hal 6

PEJUANG
'Si Raja Mogok' SURYOPRANOTO
Sosok penting untuk melihat 100 tahun pemogokan buruh nusantara.. hal 10

posisi

Bahaya Kooptasi Politik Elit Menjelang Pemilu 2014

Perlawanan-perlawanan kaum buruh yang sedemikian massif juga diikuti dengan penambahan jumlah buruh yang berserikat, hingga lebih dari 5 juta buruh yang saat ini telah berserikat. Selain itu, kesadaran untuk membangun persatuan yang lebih permanen diantara sesama serikat buruh—maupun dengan kelompok gerakan lainnya—juga semakin kuat. Kelahiran MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) pada May Day tahun lalu, atau kelahiran Sekber Buruh dua tahun yang lalu adalah wujud kongkrit dari kesadaran..

KIBAR JUANG adalah alat konsolidasi bersama gerakan membangun kekuatan politik anti kapitalisme, membangun partai kelas buruh/rakyat, menuju kekuasaan rakyat di Indonesia dan membangun sosialisme. Redaksi menerima tulisan, komentar, saran dan kritik melalui email kibarjuang@yahoo.com, atau hubungi agen-agen **KIBAR JUANG** di tiap kota terdekat. **KIBAR JUANG** terbit dua mingguan

Editorial

Edisi ke empat Kibar Juang telah hadir di tangan kawan-kawan, para pejuang yang gigih menentang kapitalisme di berbagai lini perjuangan, ditengah masih sedikitnya koran-koran politik alternative yang berskala nasional.

Kibar Juang edisi IV, terlambat sampai, disebabkan karena tidak semua agen/distributor Kibar Juang menyetorkan dana—dari informasi yang diterima dewan redaksi, kebanyakan digunakan untuk aktifitas perjuangan lainnya—Namun sebagaimana yang kita yakini, bahwa kerja politik revolusioner yang paling utama adalah agitasi-propaganda, maka untuk kedepan, tidak boleh lagi, dana Kibar Juang digunakan untuk hal lainnya, kita semua harus memastikan Kibar Juang terbit tepat waktu.

Baru beberapa waktu yang lalu, jutaan kaum buruh di Indonesia, turun ke jalan, dan sekali lagi menunjukan kapasitas politik-organisasinya, sekalipun berbagai upaya dilakukan oleh Rezim Kapitalis SBY-Boediono dan para pengusaha untuk melemahkan agenda MAY DAY, dimana MAY DAY 2013 yang lalu, adalah MAY DAY yang sangat penting bagi gerakan buruh untuk menyatakan sikap menjelang pemilu 2014.

Pemilu 2014 nanti, adalah pemilu yang hanya diikuti oleh partai-partai politik yang trade record-nya sebagai partai penindas rakyat—Partai yang mendukung pelanggaran HAM, Partai yang mendukung perampokan kekayaan alam oleh Modal Internasional maupun Swasta Dalam Negeri, Partai yang mendukung politik diskrimansi terhadap minoritas maupun gender, Partai pendukung politik upah murah dan perampasan tanah, Partai para bandit dan korptor.

Sejatinya rakyat sudah mengerti, pemilu 2014 nanti tidak akan membawa perubahan, namun sayangnya sebagian pejuang-pejuang rakyat, justru terjebak dalam kooptasi politik partai anti rakyat ini, sehingga baik atas nama pribadi maupun organisasi , mendaftarkan diri menjadi calon-calon anggota legislative dari partai-partai bandit tersebut. Tentu saja, bahaya ilusi perubahan (dari partai bandit) akan kembali menguat di massa rakyat.

Walau tidak semuanya ikut dalam politik bandit, masih ada sebagian gerakan yang bahkan semakin menguatkan tekad untuk membangun alat perjuangan politik rakyat, alat perjuangan yang lepas dari kooptasi elit-elit politik.

Ini adalah momentum yang baik, bagi kekuatan sosialis untuk semakin menyatukan diri, mendorong terbangunnya kekuatan sosialis bersama dengan kekuatan rakyat yang mandiri, yang punya demarkasi jelas; siapa kawan siapa lawan.

Akhir kata, semoga Kibar Juang menjadi bacaan alternative,sebagai bagian dari upaya yang tak henti untuk perjuangan sosialisme di Indonesia.

Dewan Redaksi *KIBAR JUANG*

Rabik Sentausa, Rosa Djamilah, Savana, Paiman, Libas KG, Ashila, Shincai, Arman, Sudiro, Robby, Jhonson

alamat: kibarjuang@yahoo.com

Bahaya Koop Menjelang

Selama tiga tahun belakangan ini, gerakan buruh Indonesia telah menunjukan kemajuan perlawanan yang signifikan, baik dalam hal tuntutan maupun metode perlawanannya. Contoh yang bisa kita lihat antara lain, bagaimana gerakan buruh—yang dipelopori oleh FSPMI—selama tahun 2011-2012 dengan gigih memperjuangan sebuah UU mengenai jaminan sosial (walaupun tidak semua gerakan buruh setuju dengan UU ini), atau contoh lainnya bagimana gerakan buruh—bersama mahasiswa—dengan gigih memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM ditahun 2012, atau gerakan buruh bersama berbagai kelompok dengan gigih memperjuangkan penolakan RUU Kamnas dan RUU Ormas. Metode perjuangan pun berkembang lewat "geruduk pabrik" dan slogan " solidaritas tanpa batas", hingga berpuncak dalam pemogokan nasional 3 juta buruh di lebih dari dari 20 kota pada bulan Oktober 2012 yang lalu—walau memang belum menang sepenuhnya.

Perlawanan-perlawanan kaum buruh yang sedemikian massif juga diikuti dengan penambahan jumlah buruh yang berserikat, hingga lebih dari 5 juta buruh yang saat ini telah berserikat. Selain itu, kesadaran untuk membangun persatuan yang lebih permanen diantara sesama serikat buruh—maupun dengan kelompok gerakan lainnya—juga semakin kuat. Kelahiran MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) pada May Day tahun lalu, atau kelahiran Sekber Buruh dua tahun yang lalu adalah wujud kongkrit dari kesadaran untuk membangun persatuan perlawanan yang berjangka panjang. Juga kelahiran berbagai aliansi-aliansi lainnya di berbagai kota yang tidak hanya bertahan dalam ukuran bulan.

Gerakan Buruh: Harapan Rakyat Untuk Perubahan

Di tengah ketidakpercayaan rakyat secara umum terhadap politik elit (Partai Elit, Pemerintah, DPR, Aparat

posisi

tasi Politik Elit Pemilu 2014

oleh : zaman aji dan Wahyu

Polisi, Tentara, Pengadilan, dan perangkat Negara lainnya), kebangkitan gerakan buruh adalah harapan besar bagi rakyat, untuk adanya perubahan yang mendasar di Indonesia. Rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang terang benderang dilakukan oleh Elit-Elt Partai dan Para Pejabat.

Lihat data berikut yang dikeluarkan oleh Kemendagri, yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2004 – 2013 ada hampir 3000 anggota DPRD yang terlibat korupsi, ada 291 kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang menjadi koruptor, ada 1.221 apartur pemerintah yang mayoritas "terpaksa" menjadi koruptor karena terseret atasannya (kepala daerah) melakukan korupsi. Data koruptor ini pastinya terus bertambah setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya (bayangkan dalam waktu 8 tahun/2920 hari, ada 3000 koruptor). Data ini baru para koruptor yang "sial" terbongkar kasus korupsinya, yang "selamat", mungkin jumlahnya lebih banyak lagi. *(http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=861)*

Rakyat juga marah dengan kebijakan Negara yang selalu mendukung perampasan tanah untuk membangun pertambangan-pertambangan yang merusak lingkungan, meminggirkan rakyat di sekitar lokasi pertambangan. Di mana lebih dari 35 persen luas daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara (http://www.berdikarionline.com/editorial/20121208/melawan-privatisasi-tanah.html) Dan celakanya, penguasaan lahan ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara represif oleh aparatus Negara (polisi, tentara, aparat pemda sampai ke aparat kelurahan).

Belum lagi rakyat yang marah, karena harga-harga sembako yang terus meningkat—semantara daya beli justru semakin turun---juga biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mencik leher. Banyak kasus, rakyat miskin yang mati akibat ditolak oleh Rumah Sakit karena tak punya duit.

Dimana-mana, rakyat marah—setidak tidaknya di bulan januari 2013 saja (terhitung dari 2-25 januari 2013), terjadi 1121 kali aksi-aksi perlawanan rakyat di seluruh Indonesia, dengan berbagai tuntutan, organisasi, baik di desa maupun kota. *(https://www.evernote.com/shard/s208/sh/54ed5263-919c-4f14-a164-a6c8dacaf964/f6c9d741bb739bfa3666a92c681ce54)*

Data koruptor ini pastinya terus bertambah setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya (bayangkan dalam waktu 8 tahun/2920 hari, ada 3000 koruptor).

Namun perlawanan yang sangat luas ini belum menghasilkan kekuatan perlawanan yang menyatu secara nasional. Baru gerakan buruhlah yang sanggup menyatukan perlawanannya secara nasional, menggerakan massa buruh dalam jumlah jutaan massa dalam sebuah aksi bersama dengan tuntutan bersama. Ya, gerakan buruh telah menunjukan kekuatannya dalam pemogokan nasional, 3 Oktober 2012, pemogokan yang pertama kalinya setelah 98 tahun yang lalu, kaum buruh Indonesia (dulu bernama Hindia Belanda), melakukan pemogokan dalam skala nasional. Sehingga gerakan buruh lah yang paling sanggup mengemban kepercayaan dari rakyat keseluruhan.

Apakah Masuknya Aktivis Buruh Ke Dalam Partai-partai Pemodal, Sebuah Harapan?

Secara umum, kaum buruh dan rakyat lainnya pun sudah mengerti, bahwa pemilu 2014 nanti tidak akan membawa perubahan bagi pengembangan demokrasi (kebebasan rakyat) maupun kesejahteraan rakyat, setidak-tidaknya ini tercermin dari survey Lembaga Survei Indonesia (LSI, Burhanuddin Muhtadi) yang memperkirakan bahwa angka Golput tahun 2014 akan mencapai angka 50%, meningkat pesat dibandingkan pemilu tahun 2009 yang mencapai 39,1 % (51 juta orang), atau pemilu 2004, yang angka golput mencapai 23,34 % (34.5 juta orang).

Atau survey yang dilakukan koran tempo, 8 april 2013, di mana 80, 4 % responden, menyatakan pandangan negative (buruk) terhadap partai-partai politik elit—terutama karena perilaku korupsinya yang sangat luar biasa.

Hal ini bukannya tidak diketahu oleh elit-elit politik ini, justru mereka sadar, bahwa semakin hari, rakyat semakin tidak percaya dengan mereka, hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq " yak-

ni meluasnya gejala amuk massa., terutama dipicu permasalahan pertanahan" Persoalan kedua, lanjut Mahfudz, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhada p lembaga, baik di eksekutif, legislatif,maupun yudikatif. Hal itu terlihat dari pembakaran kantor polisi, kantor Komisi Pemilihan Umum D aerah, dan lainnya. *(http://nasional.kompas.com/read/2012/01/31/1852314/5.Ancaman.Keamanan.Dalam.Negeri)*

Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah sangat rendah ini, wajar kemudian tokoh-tokoh populis dimunculkan, seolah-olah dengan adanya tokoh populis ini, sanggup menyelasaikan persoalan rakyat. Ambil contoh, Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ditengah euforia populisme, Jokowi-Ahok justru membuat kebijakan penangguhan upah buruh di DKI Jakarta, bahkan untuk MAY DAY 2013 nanti, Ahok malah menganjurkan agar buruh tidak melakukan demonstrasi, melainkan dengan acara joget (bagaimana mungkin Ahok menyerukan buruh bersenang-senang, semantara upahnya ditangguhkan, system kerja kontrak dan ousourcing masih merajalela?), dan baru-baru ini, Ahok malah memberikan stigma komunis bagi rakyat yang menuntut ganti rugi atas tanahnya (stigma yang dulu digunakan Soeharto/Orde Baru-Militer, jika ada rakyat yang kritis)

Nah, untuk kepentingan pencitraan, sekarang ini—bahkan semenjak pemilu sebelumnya—partai politik elit, lalu membuka pintunya bagi aktivis/pejuang-pejuang rakyat, agar bergabung, dengan menjadi kandidat calon kepala daerah maupun menjadi calon-calon legislative pada pemilu 2014 nanti.

Umpan ini rupanya bersambut. Aktivis-aktivis mahasiswa yang dulu diculik oleh Militer di Jaman Soeharto, sebagian diantaranya bergabung dengan Partai Gerindra—Sementara Jendral Prabowo diduga kuat, adalah pelaku penculikan—atau aktivis-aktivis tani, yang juga bergabung dalam Partai Gerindra—padahal petani banyak yang terbunuh oleh aparat militer ketika mempertahankan hak atas tanah.

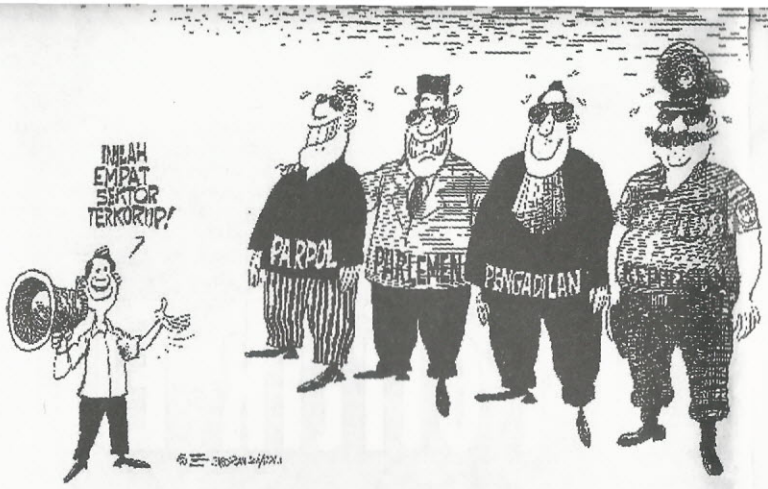

Sebagian aktivis lainnya memilih bergabung dengan PDIP, partai yang pernah memenangkan pemilu di tahun 1999, dan kemudian di tahun 2001, Megawati menjadi Presiden, periode di mana UU perburuhan dirombak total sehingga menjadi seperti sekarang ini—pelegalan system kerja kontrak dan ousourcing, pembatasan pemogokan, peradilan perburuhan yang bertele-tele dll. Juga periode di mana pencabutan subdisi berjalan semakin massif (Mega menaikan harga BBM, Listrik dan Telepon sekaligus), juga privatisasi BUMN-BUMN. Demikian juga, banyak aktivis yang bergabung ke PKB, PKS, HANURA, NASDEM (pecahan Golkar) dan partai-partai elit lainnya.

..aktivis mahasiswa yang dulu diculik oleh Militer di Jaman Soeharto, sebagian diantaranya bergabung dengan Partai Gerindra—Sementara Jendral Prabowo diduga kuat, adalah pelaku penculikan..

Di kalangan gerakan buruh pun, hal semacam ini terjadi. Di Pemilu 2004 yang lalu, Bambang Wirahyoso (yang merupakan ketua umum SPN), menjadi caleg dari PKS, demikan juga Said Iqbal (Presiden FSPMI) juga menjadi caleg dari PKS, atau Waras Wasito (SPN) yang menjadi caleg dari PDIP, dan masih banyak lainnya, walau mayoritas gagal menjadi anggota DPR pada pemilu lalu. Beberapa yang berhasil seperti Budiman Sudjatmiko—anggota DPR RI dari PDIP atau Dita Sari – Juru bicara Menteri Tenaga Kerja, justru lebih menampilkan wajah politik elit ketimbang politik gerakan.

Untuk pemilu 2014, taktik semacam ini diulang kembali, bahkan dengan keputusan organisasi---dahulu masih menjadi keputusan personal, walau tetap saja, karena posisi di serikat buruh adalah pimpinan, mesin-mesin organisasipun digunakan untuk memberikan dukungan. Hal ini tercermin setidaknya dari keputusan FSPMI Nomor 01077/Org/DPP FSPMI/III/2013 yang ditangani langsung oleh Presiden dan Sekjen DPP FSPMI KSPI (Said Iqbal dan Suparno) yang isinya antara lain FSPMI akan melakukan pendekatan dengan partai politik yang memiliki platform perjuangan yang relatif sama dan searah dengan platform perjuangan FSPMI; Serta Menempatkan kader FSPMI sebagai bakal calon anggota legislatif pada partai politik dengan daerah pemilihan yang berbeda.

Secara positif, kita bisa menduga, bahwa tujuan untuk memasukan aktivis-aktivis FSPMI (ataupun aktivis organisasi gerakan lainnya, jika itu merupakan keputusan organisasi) demi tujuan untuk mempermudah perjuangan rakyat; Dengan adanya anggota DPR/DPRD, atau menjadi Kepala Daerah dari anggota organ-

isasi gerakan rakyat, maka berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR/DPRD, atau Kepala Daerah lebih mungkin dikontrol, atau kalau ada persoalan buruh/rakyat, maka respon dari DPR/DPRD atau Kepala Daerah diharapkan bisa lebih cepat, dan bertanggung jawab.

Namun kenyataan kedepan bisa menjadi pahit, ditengah seluruh partai politik peserta pemilu adalah partai elit, partai anti rakyat, maka satu dua aktvis (sekalipun mendapatkan dukungan dari organisasinya) tidak dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan perjuangan rakyat. Bahkan agar bisa masuk menjadi anggota DPR/DPRD, para aktivis inipun sudah harus ikut mengkampanyekan "kebaikan-kebaikan palsu" dari partai yang didukungnya. Misalkan ada aktivis yang ikut dari partai PDIP, maka tentu saja agar bisa diterima di PDIP—hingga akhirnya menjadi caleg tetap—harus menutupi kesalahan PDIP ketika PDIP dahulu juga mencabut subsidi BBM, menetapkan UU 13/2003, menjual BUMN-BUMN—dengan kebohongan-kebohongan dihadapan buruh atau rakyat. Demikian pula, jika masuk melalu PKS, maka sikap PKS yang mencla mencle saat Rezim SBY-Boediono berencana menaikan harga BBM di bulan maret 2012 lalu, akan dibenarkan, atau Korupsi yang dilakukan oleh Presiden PKS, juga akan dimaklumi—demikian juga dengan dosa-dosa politik lainnya. Apakah mungkin aktivis-aktivis ini akan membongkar keburukan partai di mana mereka jadi caleg ? Artinya, dalam periode sebelum menjadi caleg tetap, hingga caleg tetap, hingga proses pemilu nanti, akan banyak kemungkinan, kebohogan-kebohogan yang dilakukan oleh aktivis (dan organisasi yang mendukungnya).

Kebohongan-kebohongan inilah yang sejatinya diharapkan oleh Elit-Elit penindas rakyat, karena akan berdampak pada kembalinya kepercayaan rakyat (bayangkan, kalo banyak aktivis yang menyatakan partai-partai Elit adalah partai yang baik, membela rakyat, demokratis dan hal-hal baik lainnya)

Sikap Kita Yang Tepat: Memperkuat Kesadaran Politik Rakyat dan Membangun Partai Kita Sendiri

Jelaslah sudah bahwa sikap yang harus diambil dalam momentum pemilu 2014 bukanlah mengirim para pejuang-pejuang buruh-rakyat ke sarang perampok uang rakyat ini dengan menjadi calon anggota dewan dalam pemilu 2014. Data diatas menunjukkan bahwa, rakyat semakin sadar bahwa seluruh partai politik peserta pemilu 2014 tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Inilah sejatinya mereka, sejatinya partainya pemilik modal yang akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro modal seperti yang ditunjukkan dalam program MP3I, privatisasi, penjualan seluruh aset kepada kapitalis (asing dan dalam negeri) pencabutan subsidi, dan dijualbelikannya hak-hak sosial rakyat (kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain sebagainya.

..kebohongan inilah yang sejatinya diharapkan oleh Elit-Elit penindas rakyat, karena akan berdampak pada kembalinya kepercayaan rakyat..

Posisi ini dijadikan pula sikap oleh SEKBER BURUH. Melalui manifestonya yang dideklarasikan pada tanggal 24 Maret 2013, Sekber Buruh menyatakan "Pemilu yang seyogyanya dapat menghadirkan "wakil rakyat" ternyata juga jauh dari tujuan "perwakilan" sesungguhnya karena mereka lebih tepat disebut sebagai wakil kaum modal dalam struktur parlemen borjuis. Maka sangat wajar, jika mereka yang menggadang-gadang diri sebagai wakil rakyat terpilih tidak menjalankan perannya. Pemilu hanya sebatas prosedural, parpol dijadikan kendaraan politik untuk kekuasaan dan mempertegas tata kuasa dominasi kaum modal di republik. Skandal korupsi kelas hiu yang menyeret anggota legislatif dalam dua tahun terakhir menjadi

salah satu bukti dari tidak berjalannya fungsi perwakilan sejatinya.

Adalah sebuah taktik yang keliru dalam situasi sekarang—jika ini dianggap taktik–ketika kaum aktivis gerakan dan kalangan rakyat menjadi calon legislative atau masuk dalam struktur dan menjadi anggota partai Elit yang jelas-jelas menindas rakyat.

Itulah sebabnya, Sekber Buruh tidak akan memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap semua partai—yang nota bene semuanya adalah partai bandit–dalam pemilu 2014 nanti. " *(http://bumirakyat.wordpress.com/2013/04/10/manifesto-politik-sekber-buruh/)*

Sikap yang harus kita ambil justru semakin memperkuat kesadaran politik spontan yang sedang bangkit ini dan menunjukkan jalannya yang tepat, yaitu membangun PARTAI KITA SENDIRI, dan mendorong kembali perjuangan untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat banyak, yaitu SOSIALISME.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 MEI 2013.

Adalah sebuah taktik yang keliru dalam situasi sekarang—jika ini dianggap taktik–ketika kaum aktivis gerakan dan kalangan rakyat menjadi calon legislative atau masuk dalam struktur dan menjadi anggota partai Elit yang jelas-jelas menindas rakyat.

zamanaji@yahoo.com

TINTA MERAH

Sosialisme dalam Kemerdekaan Nasional [1945]

oleh : Rabik

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.,
diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Soekarno-Hatta

Teks di atas hanyalah bukti di atas kertas bahwa Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi dalam kenyataan, tentara Jepang yang sudah mengaku kalah dari sekutu (AS dan Inggris) belum juga meninggalkan sebagian besar wilayah Indonesia. Setelah tentara Jepang dilucuti pergi, sekutu sebagai pihak pemenang Perang Dunia II pun sudah datang bersama NICA (Netherland Indies Civil Administration/ pemerintahan sipil Hindia Belanda) untuk menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Sehingga terjadilah kekuasaan ganda saat itu: pemerintah Republik Indonesia (dengan wilayah yang belum semua memiliki perwakilan pemerintahan) dan NICA/Belanda yang menguasai beberapa wilayah RI serta melakukan 2 kali agresi militer untuk perluasan wilayah pendudukan. Situasi perang ini bertahan hingga tahun 1949 dimana Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) mengakui kedaulatan RI (tanpa Irian Barat/Papua) dan menarik pasukannya dari wilayah kedaulatan.

Perundingan dan Kedaulatan

Perihal "perundingan dengan Belanda" yang dimulai dari Linggarjati, Renville, Roem-Royen sampai akhirnya KMB yang menetapkan pembebanan hutang pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia (hutang RI pertama kalinya) memang telah menimbulkan pertikaian politik yang tajam dan sengit, termasuk di kalangan yang mengaku sosialis sendiri. Ini sejalan dengan pertempuran fisik (perang) rakyat yang sengit pula di banyak tempat untuk mempertahankan wilayah dari intervensi sekutu/NICA. Setiap kemenangan maupun kekalahan pertempuran mempengaruhi jalannya perundingan.

Kelompok Syahrir (PSI) merupakan yang pertama mengambil jalur berunding untuk kemerdekaan terbatas, yaitu wilayah Sumatera, Jawa dan Madura, agar tentara Hindia Belanda pergi. Amir Syarifudin (PKI) juga sempat terseret dalam kesepakatan yang lemah sewaktu berada dalam kabinet (kemerdekaan sebatas Sumatera, Jawa tengah, DIY), walau PKI saat itu tetap memprogramkan "kemerdekaan sepenuh-penuhnya" sebagai syarat perundingan dengan Belanda. Kelompok Tan Malaka (PARI) juga memprogramkan "kemerdekaan 100%" sebagai syarat berunding.

Argumen Syahrir (yang selaras dengan Hatta dan kemudian diikuti oleh Soekarno sebagai penjelasan pemerintah saat itu) menekankan pada persoalan mendesak menghentikan perang untuk membangun kesejahteraan rakyat, diakui oleh dunia internasional (dalam wilayah semaksimal yang didapatkan) dan mengkonsolidasikan kekuatan militer untuk perjuangan selanjutnya. Sedangkan bagi Musso (PKI) dan Tan Malaka (PARI/Murba) yang juga berpandangan sosialis, kesejahteraan rakyat dan pengakuan internasional sulit terwujud tanpa kedaulatan penuh atas wilayah yang merupakan warisan wilayah Hindia Belanda sebelumnya dan kemandirian dari campur-tangan Belanda lewat lembaga persekutuan sejenis persemakmuran Indonesia-Belanda. Mereka berdua percaya bahwa rakyat yang sudah membentuk angkatan perang nya sanggup mengusir Belanda di setiap wilayah pendudukan.

Melawan Fasisme

Tetapi sebelum menyatakan merdeka, yakni saat Jepang masuk di tahun 1942, sosialisme di Indonesia juga mendapat pengalaman untuk bertemu Fasisme. Dalam hal ini pandangan sosialis menunjukkan perbedaan tajamnya dengan politik nasionalis maupun islam. Dari kelompok Tan Malaka (PARI), kelompok Syahrir (PSI) sampai kelompok Amir Syarifudin (PKI) bersikap sama-sama non-koperasi dengan Jepang yang didaulat sebagai kekuatan politik Fasis. Mereka meyakini Imperialis-Fasis

IMB 1949

merupakan penjajahan yang lebih eksploitatif dan kejam dibandingkan Imperialis-liberal (Belanda).

Namun Fasisme Jepang saat itu mampu mengajak kerjasama kelompok politik Nasionalis (Soekarno) dan Islam (Buya Hamka) untuk mengusir kekuasaan kolonial Belanda dan memperkuat pertahanan Jepang menghadapi sekutu. Pihak yang paling konservatif/kanan percaya bahwa faktor kedekatan "ras/bangsa timur" membuat penjajahan Jepang akan lebih baik daripada penjajahan Belanda. Apalagi status pribumi diangkat melebihi status warga Indo-Belanda saat itu dan organisasi-organisasi Islam (khususnya Majelis Islam A'la Indonesia-MIAI yang kemudian berubah menjadi Masyumi) masih diperbolehkan berdiri ditengah larangan terhadap semua organisasi pergerakan. Sedangkan pihak yang lebih radikal/kiri seperti Soekarno berpandangan, bahwa kerjasama dengan Jepang adalah untuk sementara bagi pengorganisasian kekuatan politik dari konsesi/kesempatan yang disediakan Jepang untuk merdeka, termasuk badan-badan yang dibentuk Jepang.

Kekejaman Jepang semakin lama membuat kepercayaan rakyat semakin luntur terhadap Jepang. Dan oleh kaum sosialis yang konsisten berjuang di bawah tanah, banyak kalangan Nasionalis dan Islam ikut bergegas untuk merdeka dari Jepang, dimana salah satu caranya adalah dengan menculik Soekarno dan memaksanya memproklamasikan Republik Indonesia.

Penghidupan Rakyat

Walau belum merdeka 'penuh' seperti dijelaskan diatas, tahun-tahun awal berdirinya RI sudah menempatkan sosialisme sebagai tujuan dari Indonesia merdeka (yang sering disederhanakan oleh Soekarno sebagai masyarakat adil dan makmur). Ini akibat dari begitu berpengaruhnya gagasan sosialisme dan politik kaum sosialis dalam kemerdekaan, termasuk terhadap Soekarno yang juga mengaku sebagai Marxis/sosialis/kiri.

Soekarno mulai menyusun syarat-syarat sosialisme di Indonesia. Salah satunya dengan membangun suatu konsep manusia Indonesia yang dalam bahasa Soekarno sebagai character building (pembangunan karakter) untuk lepas dari budaya kolonialisme, dimana salah satu bentuknya dengan menghubungkan pelajaran dengan realita sosial dan metode belajar bersama/berkelompok. Sejalan dengan ini, terbentuknya kurikulum 1947 tidak lepas dari konsep ini yang menekankan aspek afeksi (rasa/karakter) dibanding aspek kognitif (pikir), sehingga lahirlah untuk pertama kalinya pendidikan Kewarganegaraan, yang salah satunya berisi tujuan-tujuan politik bangsa, dan didalamnya terdapat pula aspek sosialisme.

..begitu berpengaruhnya gagasan sosialisme dan politik kaum sosialis dalam kemerdekaan, termasuk terhadap Soekarno yang juga mengaku sebagai Marxis/sosialis/kiri.

Usaha ini dibarengi dengan pembangunan banyak sekolah sampai universitas. Terlepas dari berhasil-gagalnya pembentukan manusia Indonesia yang diidamkan Soekarno—oleh karena carut-marutnya ekonomi pasca perang dan limpahan hutang Hindia Belanda (hasil KMB) yang mengakibatkan masih kurangnya angka partisipasi sekolah, tetapi usaha ini menunjukkan bahwa pembangunan sosialisme ala Soekarno memiliki segi pembangunan karakter di sekolah-sekolah.

Namun sayangnya Soekarno dari awal tidak memprioritaskan untuk memutus pengaruh dan rantai modal Imperialis di Indonesia, yang kemudian memunculkan banyak protes dari kelompok sosialis. Setelah masalah Irian Barat/Papua 'dipermainkan' oleh Belanda, barulah Soekarno mengikuti arus kehendak kelompok sosialis untuk membatalkan KMB pada 1956 dan kemudian menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia pada 1958. Pendapatan dari perusahaan-perusahaan ini direncanakan untuk membiayai pembangunan ekonomi rakyat.

Namun nasionalisasi perusahaan Belanda ala Soekarno ini kemudian menyimpang ditangan tentara pimpinan A.H Nasution. Kaum buruh yang sudah berupaya untuk menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut secara demokratis (setelah sebelumnya melakukan mogok nasional di perusahaan Belanda) disabotase oleh tentara atas nama "darurat perang" untuk masalah Irian Barat. Ini menyebabkan ketegangan antara gerakan serikat buruh dengan tentara saat itu—dimana Soekarno kembali berkompromi—dan membuat gagalnya nasionalisasi bagi upaya pembangunan sosialisme.

Kelompok sosialis kemudian juga mendorong suatu sistem kepemilikan yang adil atas tanah sebagai syarat bagi kesejahteraan petani. Hal ini berbuah UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan perpu No.56 tahun 1960 yang memperkecil kesenjangan kepemilikan tanah di desa-desa. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap keluarga petani seha-

ekarno bersama buruh, mayday 1965

rusnya mendapat tanah minimal 2 hektar yang akan diusahakan oleh pemerintah. Sedangkan kepemilikan tanah dibatasi seluas 5 hektar untuk wilayah sangat padat dan 15 hektar untuk wilayah tidak padat.

Lagi-lagi kebijakan ini tidak dijalankan dengan serius oleh pemerintah Soekarno dengan berbagai penyebab politik yang terlalu kompromis. Kelompok sosialis (khususnya PKI) mulai menyerukan aksi-aksi untuk menjalankan peraturan diatas yaitu dengan menduduki tanah-tanah yang diluar batas kepemilikan dan membagikannya kepada petani.

Mempercayai Kekuatan Massa

Memang tidak mudah untuk memimpin sebuah negara yang baru lepas dari kungkungan sistem kolonial, karena terlalu banyak kerusakan yang dihasilkannya. Tetapi bagi seorang Soekarno yang mengaku sebagai 'kiri', konsepsi-konsepsi yang dia miliki tetap akan berkekurangan jika dia tidak mempercayai 'kekuatan massa' sebagai tenaga penggerak perubahan. Hal inilah yang masih dipegang teguh kelompok-kelompok yang berpandangan sosialis dalam kemerdekaan.

..kekuatan sosialis lah yang paling percaya pada kehendak massa dalam melawan..

Dalam peristiwa perang mempertahankan wilayah, kekuatan sosialis lah yang paling percaya pada kehendak massa dalam melawan secara radikal intervensi wilayah oleh sekutu/NICA. Begitu juga dalam peristiwa nasionalisasi perusahaan Belanda, pandangan sosialis juga yang percaya pada kontrol buruh terhadap perusahaan tersebut. Sampai akhirnya dalam kebijakan agraria, kelompok sosialis juga yang mendorong kaum tani untuk berdaulat atas tanah secara nyata.

Ini lahir dari pemahaman sosialisme atas kelas-kelas dalam masyarakat yang membentuk negara, dimana 'peraturan diatas kertas' (seperti juga teks proklamasi diatas) yang berhasil dibuat oleh negara, tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kelas-kelas yang berkepentingan untuk menjalankannya dengan konsisten.

Sumber:

Anton Lucas, "Radikalisme lokal: Opōsisi dan Perlawanan terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945)", Syarikat Indonesia, 1992.

Bondan Kanumoyoso, "Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia", Pustaka Sinar Harapan, 2001

Jacques Leclerc, "Amir Syarifudin: Antara negara dan revolusi", Jaringan kerja budaya, 1996

http://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1948-Gerpolek.htm

http://www.marxists.org/indonesia/indones/1948-JalanBaru.htm

MayDay 2010, Havana Kuba

Hanya dalam Sosialisme, Kemanusiaan Dihargai

PELAJARAN DARI KUBA

oleh Rosa Djamilah

"modal manusia (human capital) jauh lebih bernilai ketimbang modal kapital (financial capital). Modal manusia meliputi tidak hanya pengetahuan, tapi juga – dan ini yang sangat mendasar – kesadaran, etika, solidaritas, rasa kemanusiaan yang sejati, semangat rela berkorban, kepahlawanan, dan kemampuan menciptakan sesuatu dalam jangka panjang "

Fidel Castro

Salah satu ukuran kesejahteraan manusia adalah ketika manusia dapat mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tanpa syarat. Hal ini tentu masih sulit dijumpai di Indonesia, dimana pendidikan dan kesehatan masih selalu menjadi faktor penghambat kesejahteraan. Tetapi ada satu negara di dunia ini dimana sistem pendidikan dan kesehatannya merupakan yang terbaik di dunia dan sudah mendapatkan pengakuan internasional. Sebuah negeri kecil yang terletak di utara Karibia, yang bukan merupakan negeri kaya, namun telah meletakkan landasan utama pembangunannya pada kemanusiaan. Negeri ini bernama Kuba, yakni sebuah negara berhaluan sosialis.

Setelah revolusi berhasil dimenang-

Foto: Soekarno dan Fidel Castro

kan pada tanggal 1 Januari 1959, pemerintahan Fidel Castro mengumumkan 6 problem mendesak yang harus diselesaikan secara bertahap: persoalan tanah, industrialisasi, perumahan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Kali ini kita coba mengulas sistem pendidikan dan kesehatan di Kuba, karena kedua hal ini sungguh dapat jadi pelajaran bagi gerakan di Indonesia dalam menjawab pertanyaan "mengapa kita membutuhkan sosialisme?"

Sistem Pendidikan Kuba: Dari Pemberantasan Buta Huruf Sampai Universitas Untuk Semua

Program pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kuba ketika mencanangkan pendidikan untuk semua rakyat adalah program pemberantasan buta huruf. Program ini mulai dijalankan pada tahun 1960, tepatnya 1 Januari, yang kemudian dijadikan sebagai Tahun Pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah memobilisasi rakyat yang sudah mendapatkan pendidikan untuk mengajarkan rakyat yang masih buta huruf, dimana kaum perempuan menjadi prioritas. Ribuan relawan pendidikan (birgardistas) diterjunkan ke kampung-kampung, desa-desa, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan dengan membawa buku-buku untuk rakyat. Semua rakyat diajak berpartisipasi mendukung program revolusi kebudayaan ini dengan slogan "jika kau tahu, maka ajarkan; jika kau tidak tahu, maka belajar" dan simbol lampu paraffin para pelukis, penulis lagu, wartawan, seniman, organisasi-organisasi rakyat turut mengkampanyekan program ini dengan karya-karya mereka. Satu tahun program ini berjalan, angka buta huruf di Kuba langsung turun drastis dari angka 23,6 % menjadi 3,9%, dan sampai hari ini PBB menyebutkan 100% penduduk Kuba yang berusia 15-24 tahun bebas dari buta huruf dan menempatkan Kuba dalam urutan ke 10 dari 125 negara yang sudah melek huruf. Kesukseskan program ini juga mendorong kaum perempuan untuk lebih banyak berpartisipasi dan masuk sebagai angkatan kerja.

Program kedua adalah sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Program sekolah gratis ini berlaku untuk semua penduduk Kuba tanpa syarat. Buku, fasilitas sekolah dan makan siang juga ikut diberikan secara gratis kepada peserta didik.

Pada tahun 2000 pemerintah Kuba meluncurkan program "Universitas untuk Semua" yang berkerja sama dengan jaringan televisi Cubavision dan Tele Rebelde. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Kuba tanpa syarat untuk mengenyam pendidikan universitas. Program pendidikan ini disiarkan melalui jaringan televisi dengan mengambil jam tayang 394 jam setiap minggunya, sama dengan 63% dari total tayangan televisi Kuba. Program ini melibatkan 775 profesor dari berbagai universitas di Kuba.

Sudah lebih dari 50 tahun pemerintah Kuba menempatkan sektor pendidikan sebagai skala prioritas dalam pembangunannya. Hasilnya dapat dilihat dalam angka-angka: 94% anak-anak Kuba menyelesaikan pendidikan dasar, 11% ilmuwan dari Amerika Latin mendapatkan gelar PHD nya di Kuba, 130.000 tenaga medis di Kuba dan 38,868 bekerja untuk 66 negara, 65% perempuan Kuba lulus universitas, 45,9% perempuan lulus ilmu komputer dan teknologi, dan masih banyak lagi kemajuan-kemajuan bagi manusia dalam rentang 54 tahun revolusi.

Sistem Kesehatan Kuba: Mencegah Sakit

Semua rakyat Kuba berhak mendapatkan pelayanan dan pengobatan GRATIS tanpa terkecuali dan untuk semua jenis penyakit. Mencegah sakit merupakan prinsip yang diutamakan oleh pemerintah Kuba dalam menerapkan sistem kesehatannya. Sebagai upaya pencegahan penyakit ada tiga tingkatan layanan kesehatan di Kuba, yaitu layanan kesehatan primer yang dikenal dengan program dokter keluarga. Konsep dokter keluarga ini diluncurkan sejak tahun 1984, dimana sampai tahun 2008 terdapat 70.000 dokter keluarga yang melayani 12 juta penduduk.

Dokter keluarga inilah yang melakukan kontrol kesehatan kepada setiap rakyat agar terhindar dari penyakit. Struktur tertinggi dari layanan kesehatan primer adalah poliklinik yang dijalankan oleh dokter-dokter ahli dan alat-alat medis yang lengkap, dimana 85% alat-alat medis adalah produk Kuba sendiri sehingga mereka dapat menghemat devisa dan tidak tergantung pada suplai dari luar negeri.

Layanan kesehatan sekunder adalah rumah sakit yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan rawat inap dan rujukan dari poliklinik/ puskesmas. Dan layanan kesehatan tertier adalah rumah sakit skala nasional dan internasional yang sekaligus menjadi pusat penelitian.

Sistem kesehatan tersebut menjadikan Kuba sebagai negara yang bebas penyakit malaria, demam berdarah, polio, tetanus, angka kematian ibu yang rendah (8 dari 1000 kelahiran), angka kematian bayi yang rendah (4,8 dari 1000 kelahiran), dan angka harapan hidup 80 tahun ditahun 2010.

Berbeda Jauh dari Indonesia

Sayangnya tempat kita hidup hari ini, Indonesia, mayoritas rakyat ma-

sih tidak dapat m engakses pendidikan dan kesehatan yang layak dan bermutu, karena sistem pendidikan dan kesehatan m emang diciptakan untuk hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dim iliki oleh pemerintah Indonesia bukanlah konsep sistem jaminan s osial sepenuhnya untuk rakyat. Mengapa? Pertama jaminan sosial tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh semua warga negara, karena sifat kepesertaannya bukanlah hak warga negara melainkan kepesertaan yang bersifat wajib (Pasal 4 huruf (g) UU SJSN). Kedua jaminan sosial ini tidak gratis, seperti tertuang dalam pasal 17 ayat (1) dengan tegas mengamanatkan bahwa "Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu". Ketiga menyerahkan pengelolaan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk diinvestasikan. Keempat manfaat jaminan kesehatan hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 23 ayat 1 UU SJSN), serta masih banyak pasal-pasal lain yang bermasalah.

Demikian halnya dengan sistem pendidikan, dimana kurikulum pendidikan kapitalis hanya dibuat untuk mencetak tenaga-tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Lembaga-lembaga pendidikan dijadikan sarana untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak heran hanya orang kaya lah yang sanggup sekolah dengan fasilitas yang berkualitas.

Bandingkan dengan Kuba yang 54 tahun diembargo oleh Amerika Serikat tetapi masih mampu mensejahterakan rakyatnya. Jauh berbeda dengan negeri kita dengan sumber daya alam yang kaya tetapi mayoritas rakyat tidak sanggup lagi sekolah dan tidak mampu membayar biaya kesehatan karena konsep pembangunan pemerintah Indonesia yang berkiblat pada kapital/modal, bukan pada manusia.

PEJUANG

SI RAJA MOGOK SURYOPRANOTO

oleh Shanchai

Suryopranoto dengan nama kecil RM Iskandar, mungkin kita masih asing dengan nama ini. Maklum saja, karena namanya tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran sejarah di Indonesia, walaupun dia adalah kakak kandung Ki Hajar Dewantara dan sempat membangun Budi Oetomo di Yogyakarta. Cucu dari Raja Paku Alam III yang lahir pada 11 Agustus 1871 ini, adalah seseorang yang senang melawan tradisi kerajaan seperti dodok sembah (berjalan jongkok sambil menyembah seorang Raja dan keturunannya) dan pada masa itu, di tengah kuatnya budaya feodalisme hal ini merupakan pandangan yang sangat radikal .

Meskipun seorang bangsawan, sempat diceritakan bahwa Suryopranoto melawati masa kanak-kanak di luar Istana, di sinilah dia mulai bergaul dengan anak-anak kampung sebayanya dan mulai melihat betapa kontrasnya kehidupan di luar tembok Istana. Sebagai keturunan raja, Suryopranoto memperolah keistimewaan untuk bersekolah di ELS (Europeesche Lagere School) atau Sekolah Rendah Eropa. Tetapi di sekolah ini Suryopranoto dikenal sebagai siswa yang suka membangkang kepada guru-guru Eropanya bahkan apabila ada siswa Belanda yang mengejek dia atau bumiputera lainnya sebagai bangsa inlander yang bodoh, maka tidak segan dia akan menantang berkelahi. Hal ini di luar kebiasaan sifat bangsawan Jawa kepada orang-orang Belanda.

Mengenal Gerakan

Suryopranoto sempat bersekolah di OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) yaitu sekolah pegawai untuk Bumiputera di Magelang dan sempat menjadi pegawai, tetapi kemudian keluar karena sering berkonflik dengan atasannya seorang Belanda. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah pertanian di Bogor. Di tempat ini lah semangat anti-kolonialnya terus muncul, pada tahun 1908 mencoba berembuk dengan mahasiswa STOVIA untuk membentuk perhimpunan tetapi usahanya ini gagal. Kemudian organisasi pemuda lainnya terbentuk yaitu Budi Utomo, Suryopranoto kemudian bergabung dan menjadi sekretaris di Yogyakarta.

Tetapi dia merasa organisasi ini masih sangat terlalu berhati-hati dengan pemerintah kolonial dan tidak terasa gerakannya di kalangan rakyat tingkat bawah. Tidak lama kemudian, Budi Utomo mengalami perpecahan dan dia meninggalkan organisasi ini, kemudian membangun gerakan yang bernama "Adhi Dharma". Gerakan ini, mirip dengan

badan sosial yang memberikan bantuan kepada 'orang tidak mampu' .

Kemudian Suryopranoto juga mulai mengenal Sarekat Islam (SI), organisasi Priyayi yang mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dia menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi ini. Pada tahun 1917, keresahan buruh semakin meningkat. Suryopranoto kemudian mendirikan Personeel Fabriek Bond atau Ikatan Buruh Pabrik (PFB) di Yogyakarta. Dalam beberapa referensi PFB memiliki 700 orang anggota. Setahun kemudian meningkat menjadi 6000 anggota ditambah 2000 calon anggota.

Pada akhir 1919, PFB menjadi serikat buruh paling besar Jawa, dengan 90 cabang dan 10 ribu anggota. Pola pergerakan PFB cukup radikal yaitu melakukan pemogokan kerja di pabrik-pabrik yang 90% anggotanya dari Pabrik Gula. PFB meluaskan serikatnya dengan menerbitkan sebuah koran propaganda dengan nama "Boeroeh Bergerak". Belanda cukup kewalahan dengan aksi-aksi pemogokan tersebut, dari sinilah nama "De Stakings Koning" atau "Si Raja Mogok" diberikan oleh Belanda kepada Suryopranoto.

Semakin Radikal

Pada Kongres Sarekat Islam IV, Mei 1919, Suryopranoto mengusulkan rencana yang cukup radikal yaitu agar SI mulai menggerakkan buruh untuk melawan ketidakadilan Pemerintah Belanda. Dia mengagitasi peserta kongres dalam pidatonya dengan mengatakan seorang pegawai Belanda dalam pabrik gula, dengan duduk ongkang-ongkang, mendapat persenan tahunan 500.000 rupiah. Sedangkan seorang penggali tanah, yang menggali lubang sedalam 24 kaki, hanya mendapat upah 1,5 sen. Dalam Kongres ini Suryopranoto juga mengatakan bahwa kemenangan klas dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum, tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata tapi bisa secara moral, protes-protes, dan jika perlu dengan "pemogokan", kesemua itu harus dilakukan secara serentak. Dia juga yang mengusulkan pentingnya sentral organisasi buruh.

Pada tahun 1920, akhirnya dibentuklah federasi buruh pertama dalam sejarah di Indonesia yang bernama Persatuan Perhimpunan Kaum Buruh (PPKB). Terdapat 22 serikat yang bergabung dalam PPKB, selain PFB serikat lain yang cukup kuat dan ikut bergabung adalah VSTP (Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel) atau Serikat Pekerja Trem dan Kereta Api. Federasi ini terbentuk dengan komposisi Semaun sebagai Ketua PPKB, Suryopranoto sebagai wakilnya, dan Agus Salim sebagai sekretaris

Redupnya Sang "Raja Mogok"

Di tahun yang sama, PFB menyerukan "pemogokan umum". Pemogokan ini melibatkan banyak serikat pekerja lainnya, selain yang tergabung dalam PPKB, Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) yang dipimpin oleh Sosrokardono sebagai ketua dan Alimin sebagai wakilnya juga ikut bergabung dalam pemogokan ini. Tetapi sayangnya gerakan pemogokan ini dihadapi oleh perserikatan pengusaha gula dengan ancaman PHK. Hal ini menimbulkan keragu-raguan di cabang- cabang PFB. Si "Raja Mogok" dipanggil oleh pihak Keresidenan Yogyakarta dan diminta untuk menghentikan mogok, sebagai imbalannya maka tuntutan ekonomis buruh akan di penuhi oleh pihak Pemerintah Belanda.

Mogok kerja akhirnya pun gagal, hal ini berdampak buruk bagi PFB secara organisasional. Ketidaktegasan kepemimpinan dalam organisasi diikuti dengan mundurnya cabang-cabang di daerah. Kondisi PFB pun semakin surut ketika SI mengalami perpecahan yang kelak dikenal menjadi SI "Merah" dibawah kepemimpinan Semaun dan Alimin yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) dan SI "Putih" dibawah kepemimpinan Suryopranoto bersama HOS Cokroaminoto dan H.Agus Salim. Perpecahan di tubuh SI juga mengakibatkan federasi PPKB ikut terbelah. Seiring dengan itu keberadaanya sebagai "Raja Mogok" semakin redup. Dan metode-metode radikal dengan cara-cara mogok dan perlawanan terhadap kolonialisme terus dipimpin oleh golongan "merah" dibawah kepemimpinan Semaun.

Suryopranoto, meskipun berada di golongan moderat. Tetapi watak melawan kolonial tetap dia bawa, sehingga keluar masuk penjara telah menjadi kebiasaannya. Pada tahun 1933, dia dipecat dari SI karena mengungkap kasus korupsi. Pada tahun 1935 sekeluarnya dari penjara Sukamiskin, dia memilih untuk mengurusi dan mengajar di sekolah Adhi Dharma. Akhirnya pada 15 Oktober 1959, Suryopranoto menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sekian.

Referensi :
- http://pedomannusantara.com/berita-hari-buruh-mengenang-kembali-perlawanan-raja-mogok-indonesia.html#ixzz2QhV34QK0
- http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjopranoto
- Budiawan. Anak Bangsawan Bertukar Jalan. Yogyakarta: LKiS, 2006.

shanchairumputliar@gmail.com

penjara kolonial

KEKUATAN

Menumbuhkan Kesadaran Politik Kelas Buruh dengan 'Sekolah Ekonomi Politik'

Wawancara dengan Danial Indrakusuma (Mantan pengajar Ekopol FSPMI)

disusun oleh Rabik & Ashila

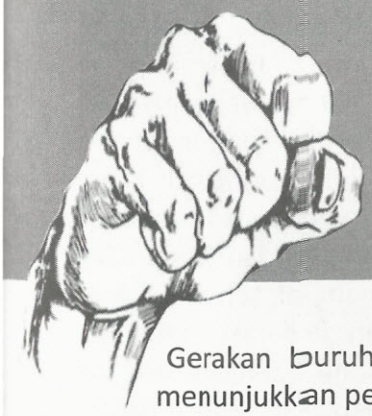

Gerakan buruh dalam 2 tahun terakhir telah menunjukkan perkembangannya. Yang terpenting adalah mogok nasional pada Oktober lalu dimana jutaan buruh mogok dan turun ke jalan. Namun masa depan gerakan yang meningkat ini masih buram. Beberapa serikat buruh dan anggota serikat buruh masih belum sampai pada kesadaran politik kelas buruh untuk mendorong perubahan yang mendasar. Dalam hal ini Kibar Juang mewawancarai seorang (mantan) pengajar ekopol FSPMI, Danial Indrakusuma, untuk sedikit mengungkap sekolah ekonomi-politik sebagai sarana yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan-tujuan mendasar penghancuran kapitalisme. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana awal mulanya anda bisa mengajar sekolah ekonomi-politik di FSPMI dan sejak kapan anda memulainya?

Sejak tahun 2010. Awalnya aku diminta oleh kawanku di FSPMI untuk membantu mengajar ekonomi-politik disana. Tapi sebelumnya aku diundang dulu di sebuah forum rapat untuk memperkenalkan konsepnya yang kemudian disepakati.

Materi-materi apa saja yang anda ajarkan dan bagaimana sistem yang anda bangun?

Materinya banyak. Lengkapnya sudah saya taruh di group facebook (Buruh Belajar Ekonomi dan Politik). Untuk kelas dasar dimulai dari penjelasan-penjelasan sejarah atas suatu kondisi atau realitas yang ada sekarang. Tujuannya adalah untuk menjelaskan asal muasal dan akar-sebab ketidakadilan, misalnya asal muasal kemiskinan, asal muasal kelas buruh di Indonesia, asal muasal kemunculan negara, asal muasal penindasan terhadap perempuan, dll. Lalu setelahnya baru ada kesimpulan ekonomi-politik dari sejarah itu. Itu disambung dengan penjelasan-penjelasan tentang situasi terkini kaum buruh maupun negara untuk mengetahui mekanisme penghisapan yang dilakukan terhadap buruh dalam bentuk upah, tunjangan, kondisi kerja, keorganisasian, status kerja dll. Dan berikut siasat-siasat melawannya, baik di dalam pabrik maupun di luar pabrik (politik). Setelah itu ada kelas lanjutan yang lebih ditekankan pada metode berpikir, yaitu teori dan filsafat yang menyimpulkan pisau analisa yang dipakai untuk menjelaskan berbagai kenyataan tadi, juga kaitan antara kenyataan, teori dan filsafat (epistemologi), yang akan memudahkan pendalaman strategi dan taktik perjuangan lebih lanjut.

Jadi, teori nya itu di belakang, bukan di awal.

Mengapa anda membuatnya demikian?

Aku punya pengalaman dulu, waktu kelompok studi. Kita diajarkan teori tapi tidak tahu gejala-gejala dan kenyataannya apa, jadi teori lebih dipahami sebagai slogan saja. Contohnya dulu ada istilah kita perlu perubahan struktural, transformatif, dialogis-partisipatoris dll. Tapi kalau tidak mengerti kenyataan kita akan sulit memahami istilah-istilah itu dan sulit mempraktekannya. Walaupun, pasti, dalam menjelaskan kenyataan (sejarah), kami sudah memakai teori dan filsafat tertentu. Sehingga ketika dalam kelas teori sudah banyak yang dapat memahaminya.

Lalu bagaimana mengatur jadwal dan kepesertaan (murid) sekolahnya?

Dalam 1 minggu ada dua kelas dengan pelajaran yang sama. Ini agar buruh yang tidak dapat mengikuti pelajaran di hari pertama karena shift atau lembur dapat mengikuti di hari selanjutnya. Untuk peserta tidak pasti. Siapa saja yang mau, yang penting sudah disosialisasi luas. Pernah peserta nya sampai 160 orang. Bagi yang lebih militan dia bisa mengorbankan 4 kali lembur dalam 1 bulan, artinya bisa mengorbankan 400 ribu sampai 500 ribu. Tapi kalau terkena shift umumnya tidak bisa diapa-apakan lagi. Selain itu, ada kelas lanjutan bagi yang (sebaiknya) sudah mengikuti kelas dasar dulu agar lebih mudah memahami. Tapi siapa yang ingin ikut juga tidak dilarang.

Apa kesulitan-kesulitan dalam membangun sekolah ekopol ini?

Yang terutama tadi, disiplin pabrik, dalam bentuk lembur dan shift. Ini menyulitkan dalam menyamakan waktu peserta/murid tetap. Ada juga persoalan bahasa yang harus lebih dipermudah agar esensi nya ditangkap. Tapi sebelum itu, yang cukup menghambat juga adalah birokratisme serikat buruh yang, dalam bahasa mereka: masuknya berbagai pengalamaan

membuat keresahan. Ya, itu karena buruh yang cerdas akan menjadi kritis setelah mengikuti sekolah ekopol. Akhir-akhir ini banyak kendala dari pimpinan-pimpinan cabang atau tingkat pabrik (PUK) yang melarang anggotanya ikut dalam sekolah ekopol dengan alasan meresahkan dan menimbulkan konflik terhadap pimpinan atau perangkat. Bahkan sekarang aku tidak diperbolehkan lagi mengajar di rumah buruh (Bekasi), tempat yang biasanya dipakai. Tapi sekolah tetap jalan di beberapa tempat, berpindah-pindah sesuai dengan yang ditawarkan peserta.

Bagaimana anda menghubungkan pengajaran di sekolah dengan perjuangan aktual buruh di dalam dan luar pabrik?

Umumnya begini: setelah ada kesimpulan bahwa masalah-masalah di dalam pabrik adalah lahir dari sistem kapitalisme (beserta negara pendukungnya), keluar dua strategi, yaitu parlementer dan ekstra-parlementer yang saling berdialektika, imbal-balik. Kapan strategi parlementer masih bisa/perlu dipakai dan kapan sudah tidak diperlukan lagi dalam perjuangan. Dalam hal siasat melawan, perjuangan di dalam pabrik akan memetakan proses produksi sampai pada uji penggalangan kekuatan sebagai latihan. Namun masalah-masalah didalam pabrik ini harus segera didorong keluar pabrik, termasuk untuk isu perburuhan, agar buruh tidak terjebak dalam pabrik serta mulai terbiasa melihat bahwa solusi dari masalah di pabrik justru akan lebih bisa dituntaskan di luar pabrik (negara dan sistim kapitalisme). Dalam hal ini, pengajaran akan didekatkan dengan kebutuhan aksi-aksi massa di luar pabrik.

Apa hubungan sekolah ekopol ini dengan kesadaran politik buruh?

Banyak. Pertama, yang penting dari buruh sejak reformasi adalah memercayai aksi massa sebagai metode perjuangan, karena ini akan menunjukkan kekuatan kelas buruh sebenarnya. Militansi berjuang juga meningkat. Selanjutnya kesadaran atas cengkraman birokrat serikat buruh sehingga sudah mulai berani mengkritik pimpinan yang menyimpang. Dalam sekolah ekopol gelombang pertama sudah ada beberapa kesimpulan bahwa buruh harus mulai berpolitik.

Bagaimana mengimplementasikan buruh berpolitik itu?

Pertama yang kita tekankan mulai aktif dalam memimpin dan mengambil jabatan-jabatan di serikat buruh maupun di luar pabrik. Selanjutnya juga mulai ikut terlibat dalam momentum pemilu atau pilkada dengan menitipkan calon-calon dan program ke partai-partai yang ada. Karena menitipkan calon pada partai-partai yang ada sekarang rawan penyelewengan maka dibuat lah mekanisme pemilu raya internal (untuk memilih calon-calon yang akan dimajukan), mekanisme kontrol dalam bentuk bahwa si calon, bila sudah terpilih, tidak bertanggung jawab pada partai tapi pada anggota serikat, dan ada kontrak politik bahwa partai tak boleh merecall si kawan yang dititipi saat bekerja setelah terpilih, hanya anggota serikat lah yang berhak me-recall-nya. Sekarang sudah ada yang menyimpang oleh pimpinan serikat. Awalnya direncanakan akan ada pemilu raya demokratik untuk memilih calon-calon yang akan diajukan, tetapi sekarang mekanisme itu ditiadakan sepihak sehingga pimpinan dapat memilih calon berdasarkan rapat pimpinan—karena mereka menganggap pimpinan adalah wakil anggota (birokrasi). Ini juga menuai kritik dari anggota.

Apa tidak ada rencana untuk mengorganisasikan pembangunan partai sendiri?

Ada tapi belum sampai ke sana dalam waktu dekat karena mereka merasa belum memiliki landasannya.

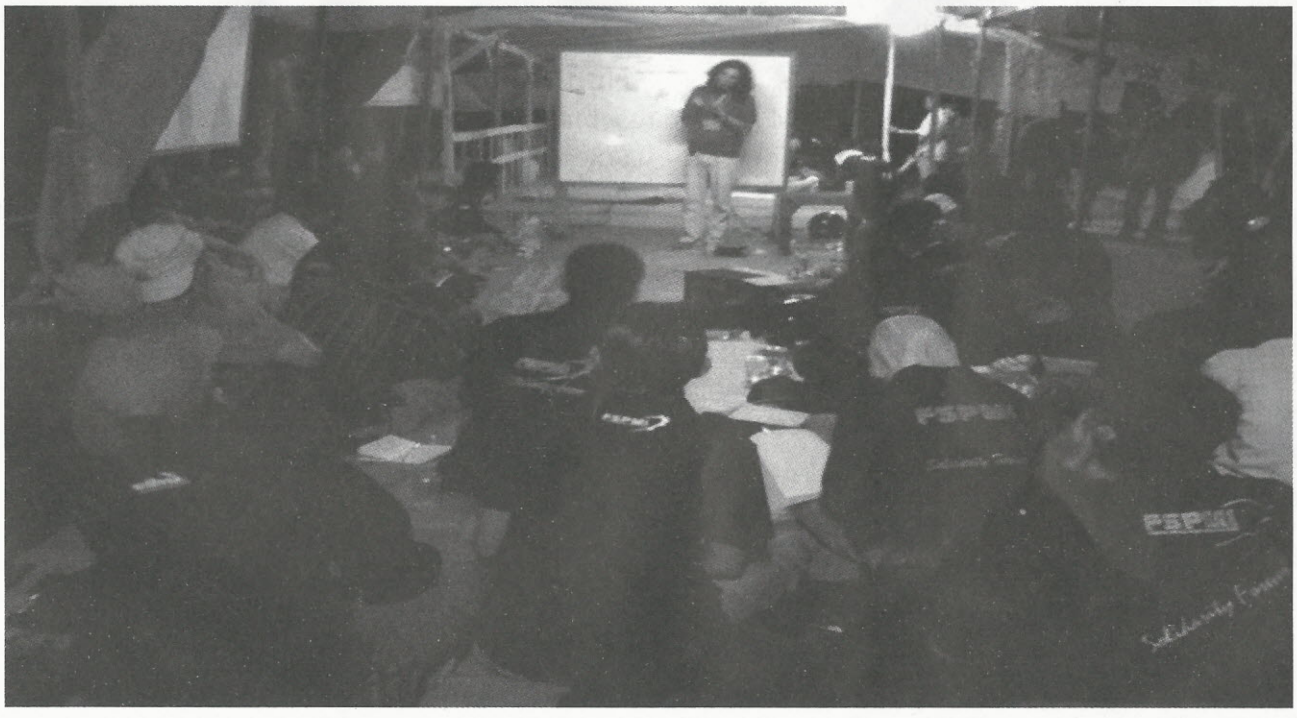

daniel mengajar ekopol

berlawan

April untuk Perempuan dan Bumi

oleh Savana

Ada dua hari penting di bulan April bagi kaum perempuan Indonesia dan semua makhluk di bumi. Tanggal 21 April dan 22 April a dalah adalah **Hari Kartini** bagi perempuan Indonesia, dan Hari Bumi bagi rakyat dunia. Kedua momen ini mendapatkan respon yang semakin meluas di Indonesia tahun ini. Peringatan hari lahir Kartini dilakukan banyak kaum perempuan, khususnya kaum perempuan muda, bukan dengan kebaya dan konde, melainkan dengan mengenal dan meneruskan gagasan-gagasan perjuangan Kartini lebih dari 100 tahun lalu. Demikian pula kesadaran memperingati Hari Bumi yang mulai mendapatkan dukungan dari gerakan sosial secara umum.

Di **Jakarta**, surat Kartini dibacakan di Taman Ismail Marzuki pada 18 April 2013 oleh perempuan-perempuan berbagai latar belakang dan generasi, termasuk oleh Jumisih, pimpinan buruh perempuan Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Pesan-pesan yang disampaikan Kartini dalam surat-suratnya begitu kuat dan masih relevan dengan persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini untuk terbebas dari penindasan politik, ekonomi dan budaya-budaya feodal,

Di pagi hari 21 April berbagai aksi mengampanyekan kemarahan perempuan terhadap kekerasan seksual juga dilakukan di beberapa titik di seputar bunderan Indonesia oleh . Komite Aksi Perempuan, termasuk aksi di depan istana negara menuntut pembatalan rencana kenaikan BBM yang merugikan perempuan. Siang harinya, Radio Komunitas Marsinah FM, Jakarta Utara, memperingati ulang tahunnya yang ke-1 dengan mendeklarasikan "Melawan Lebih", yaitu gerakan melawan lebih terhadap upah murah, perkosaan, KDRT, dan premanisme. Di kesempatan yang sama juga diluncurkan Barisan Maju Buruh (BAMBU) Perempuan yang dibentuk sebagai kekuatan perempuan untuk mempertahankan diri sekaligus melawan terhadap berbagai tindakan kekerasan. Slogan BAMBU, "Bisa Bertahan, Siap Melawan" adalah posisi sekaligus strategi perlawanan kaum buruh perempuan agar berani mengatakan tidak, dan dengan percaya diri sanggup melindungi dirinya sendiri serta mengadvokasi teman-temannya dari berbagai tindak kekerasan.

DI **Yogyakarta**, tepat di 0 kilometer, malam untuk Kartini digelar oleh berbagai organisasi mahasiswa, kelompok perempuan, dan dan beragam komunitas kampus. Satu persatu wakil kelompok bergilir membacakan surat Kartini yang tak hanya bersikap terkait pendidikan melainkan hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian variasi kegiatan peringatan Kartini juga terjadi di **Medan, Samarinda, Ternate, Mojokerto**, dan kota-kota lain yang diinisiasi berbagai kelompok perempuan seperti Perempuan Mahardika.

Hari bumi yang jatuh pada tanggal 22 April juga direspon di banyak tempat di Indonesia oleh kelompok-kelompok mahasiswa, buruh dan tani, khususnya dalam menyokong perlawanan warga desa, kaum tani, dan masyarakat adat untuk melawan pertambangan yang menyingkirkan rakyat. Aksi hampir terjadi di semua kota-kota besar.

Di **Jakarta**, Aksi Bersama Hari Bumi mengangkat tema *Selamatkan Bumi dari Korporasi dan Pemerintah Perusak Lingkungan* dan menyasar kantor Freeport Indonesia sebagai simbol utama korporasi yang paling menyumbang bagi pengrusakan lingkungan dan HAM. Aksi bersama diselenggarakan oleh National Papua Solidarity (NAPAS), Jaringan Tambang, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMI), Politik Rakyat, PPR dan KPO-PRP.

Di **Samarinda**, spanduk bertuliskan "Tolak Tambang Anti Rakyat" dibentangkan di jembatan Sungai Mahakam oleh aksi yang digelar oleh Konsolidasi Rakyat Menggugat Tambang Anti Rakyat (KRAMAT). Pertambangan batu bara sudah menutup 71% lahan di Kalimantan Timur itu.

Sedang di **Makassar** dan **Sinjai**, Sulawesi Selatan, aksi melawan perampasan tanah dan korporasi perusak lingkungan digelar oleh berbagai kelompok yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak Tambang (GERTAK). Mereka melanjutkan perlawanan sebelumnya yang telah membuahkan kriminalisasi terhadap 11 orang pejuang rakyat.

Di Kabupaten **Tojo Una-Una**, Sulawesi Tengah, warga desa Podi bersama kelompok-kelompok mahasiswa dan lingkungan: PEMBEBASAN, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jaringan Tambang, dan Yayasan Merah Putih (YMP), melakukan konsolidasi dan aksi-aksi berkelanjutan menolak tambang Nikel PT. Artaindo Jaya Abadi. Desa Podi adalah desa yang sudah rawan bencana akibat pencemaran dan banjir yang membuatnya masuk dalam bencana skala nasional.

Mayday dan Hardiknas

Hari Buruh Internasional (Mayday) dan Hari Pendidikan Nasional tahun ini diperingati secara luas di Indonesia. Di **Jakarta**, ratusan ribu buruh dari Sekber Buruh, MPBI dan kelompok-kelompok pergerakan lain termasuk mahasiswa mengepung Istana negara dari pagi hingga sore. Selain tuntutan-tuntutan normatif seperti upah dan sistem kontrak/outsourcing, Mayday kali ini buruh lebih memperlihatkan ketidakpercayaan nya kepada partai-partai yang ada hari ini yang dinilai pro pemilik modal (borjuis), korup dan pelanggar HAM. Sekber Buruh misalnya, dalam aksi ini menyerukan buruh dan rakyat untuk membangun alat politik yang mandiri untuk kekuasaan rakyat.

Di **Indramayu**, aliansi rakyat yang terdiri dari SBI-KASBI, SNT dan SPPI mendapat tindak kekerasan dari organisasi semirip preman, yaitu pemuda pancasila. Ironisnya hal ini malah dibiarkan oleh aparat kepolisian dan Kodim setempat. Tindak kekerasan para preman dilakukan karena kordinator aksi (Kholik) menolak permintaan preman untuk tidak mengkaitkan aksi hari buruh dengan isu-isu politik. Penolakan ini karena massa menilai sangat tidak mungkin memisahkan ketertindasan buruh hari ini dari kebijakan politik penguasa. Massa aksi sempat melakukan perlawanan walau akhirnya menahan diri untuk kembali melanjutkan aksi.

Sedangkan di **Pangkajene kepulauan (Pangkep)**, Sulawesi selatan, aksi mayday dilakukan di depan Politeknik Pertanian Negeri. Walau hanya diikuti sekitar 10 orang, mahasiswa yang tergabung dalam Komunal Mahasiswa Pangkep Kerakyatan (Kompak) berorasi dan menyebarkan selebaran tentang kebobrokan elite politik. Dalam spanduk mereka tertulis "Cukup sudah tertindas; bangun partai kelas pekerja, hancurkan kapitalisme"

Di **Medan**, berbagai elemen pergerakan rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Tertindas (FPRT) juga berduyun-duyun mendatangi kantor Gubernur Sumut untuk menyatakan perlawanan kepada setiap kebijakan yang menindas.

Begitu juga di Samarinda, Banjarmasin, Makasar, Polman, Ternate, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Mojokerto, Bandung, Karawang, Palembang, Lampung, dan kota-kota lainnya, aksi Mayday diperingati dengan gegap-gempita perlawanan kaum buruh dan rakyat.

Keesokan harinya, 2 Mei 2013, **Hari Pendidikan Nasional** juga diramaikan oleh berbagai aksi rakyat di pelosok nusantara. Walau didominasi kelompok-kelompok mahasiswa, berbagai elemen buruh dan rakyat lain juga meresponnya dengan antusias.

Di **Jakarta**, Sekber Buruh bersama elemen mahasiswa kembali turun kejalan. Hal yang sama juga dilakukan Aliansi Revolusi Pendidikan (ARP) di depan gedung MK dan istana negara. Selain menolak kapitalisasi pendidikan secara umum, mereka juga menuntut penghapusan Ujian Nasional (UN), kurikulum 2013, dan demokratisasi kampus. Tidak ketinggalan pula mereka menyerukan pembangunan kekuatan politik bagi kekuasaan rakyat.

Di **Yogyakarta**, elemen pergerakan yang tergabung dalam Menolak Dijajah Kembali (Monjali) dan Gerakan Revolusi Pendidikan (GRP) menggelar aksi di dua titik. Mereka berjalan menuju 0 KM dan berkumpul depan kampus UIN-SUKA di jalan solo. Selain melawan kapitalisasi pendidikan secara umum, mereka juga menolak pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pencabutan UU Perguruan Tinggi.

Di **Polewali Mandar (Polman)**, aksi dilakukan Forum Komunikasi Siswa Progresif (FKSP) dengan berjalan dari sekolah-sekolah menuju kantor DPRD. Mereka kembali menuntut penghapusan Ujian Nasional dan pemberlakuan pendidikan gratis dan ilmiah dari SD hingga perguruan tinggi.

Aksi peringatan hari pendidikan nasional tahun ini lebih bersemangat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam 1 tahun terakhir ini RUU Perguruan Tinggi yang bermuatan kepentingan modal telah disahkan.

BANGUN PARTAI

Ayo Bangun dan Perluas Lingkaran-Lingkaran Sosialis!

Sudah semakin jelas bagi kita para pejuang rakyat, bahwa partai-partai yang ada hari ini tidaklah mampu menjawab masalah rakyat. Karena partai-partai itu sendirilah penyebab dari masalah. Partai-partai yang dibentuk dan dihuni oleh para pemilik modal yang menindas rakyat, para koruptor, para pelanggar HAM dan abai demokrasi, para perusak lingkungan, para agen-agen kepentingan modal asing. Merekalah partai-partai yang mengikuti Pemilu 2014. Dengan demikian kita sudah bertekad untuk membangun partai kita sendiri yang mandiri, yang berisi para pejuang rakyat yang tulus dan bersemangat berjuang demi kesejahteraan dan keadilan untuk membangun tatanan masyarakat berkeadilan sosial: Sosialisme.

Namun demikian, proses pembangunan PARTAI KITA secara BERSAMA-SAMA ini bukanlah proses yang instan atau sekali jadi. Dia harus berdiri diatas kesabaran berproses, ketekunan belajar, semangat berjuang, dan ketelitian menggagas solusi bagi kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat mayoritas.

Untuk itu penting dan perlu memulai pembangunan partai kita dengan membentuk **lingkaran-lingkaran sosialis** yang terdiri dari elemen-elemen pergerakan rakyat yang berkehendak merubah tatanan masyarakat kapitalisme yang sekarang ini bercokol di Indonesia.

Apa dan Bagaimana Lingkaran Sosialis?

Lingkaran sosialis merupakan embrio partai kita. Lingkaran sosialis ini merupakan proses awal dimana kita harus berusaha sekuat tenaga untuk saling menjalin pengetahuan bersama diantara individu-individu anggota lingkaran lewat diskusi-diskusi reguler, agar pengetahuan dapat dimiliki secara lebih merata. Langkah ini merupakan anti-tesis dari kesenjangan pengetahuan yang diciptakan sistem kapitalisme terhadap rakyat.

Lingkaran sosialis haruslah dibangun berdasar individu-individu yang berkomitmen membangun partai. Setiap lingkaran sosialis sebaiknya tidak lebih dari 10 orang/ individu. Ketika anggota lingkaran sudah melebihi dari 10 orang, sebaiknya lingkaran dipecah menjadi 2 lingkaran dalam lingkup teritorial yang sama. Untuk perluasan dan pengembangan lingkaran, setiap lingkaran perlu untuk membicarakan individu-individu yang akan dijadikan target dalam lingkaran.

Sangat penting untuk memilih/menunjuk 1 orang kordinator yang bertugas mengkordinasi rapat-rapat lingkaran. Jika perlu, lingkaran dapat memilih penanggung jawab tugas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan lingkaran. Lingkaran-lingkaran dalam suatu lingkup teritorial (kampung/kawasan/kampus) atau sektoral (buruh/mahasiswa/tani/ miskin kota) juga berfungsi untuk memperluas pembentukan lingkaran di teritorial yang berdekatan atau sektoral yang beririsan, agar keberadaan lingkaran sosialis ini mampu sedapat mungkin menjangkau individu-individu yang berkehendak kuat untuk perubahan.

Untuk menjalankan itu, alat kita adalah KIBAR JUANG. Setiap lingkaran berkewajiban mendiskusikan dan membahas tema-tema yang ada dalam terbitan. Anggota lingkaran juga berfungsi sebagai distributor koran/terbitan. Kordinator haruslah mencatat anggota-anggota lingkaran agar memudahkan tugasnya mengkordinir anggota. Dia juga berhak mengajukan tema-tema yang akan menjadi perdiskusian, baik kepada anggota maupun kepada REDAKSI KIBAR JUANG untuk dimasukkan dalam tulisan.

Lingkaran sosialis ini, sebagai embrio partai kaum gerakan harus juga membicarakan gerakan yang berkembang dalam teritorial masing-masing dan terlibat dalam gerakan, baik yang sudah ada maupun membangunnya sendiri.

Sekarang saatnya kita mulai berproses dengan semangat juang yang lebih tinggi!

Salam Sosialisme!

KIBAR JUANG *diterbitkan oleh para pejuang/aktivis dari berbagai organisasi perjuangan: serikat buruh, serikat tani, mahasiswa/pelajar, tani, nelayan, pemuda, kaum miskin kota, perempuan, lingkungan dan aktivis dari organisasi politik sosialis.*

KIBAR JUANG *menerima tulisan, foto, karikatur dan karya lain yang mendukung pergerakan rakyat, melalui email kibarjuang@yahoo.com*

AGEN *KIBAR JUANG*

Medan: Leli-087769243136, Dedi-08126356801, Iwan-081370706967, Resty-085762949457
Palembang: Dahlan-081958154246
Tangerang: Joko-081808020544, Erwan-08567434660
Jakarta: Bona-087780844522, Erwin-0883878336974, Edi-085693826689, Zely-08158126673, Jumisih-08561612485, Rosid-081210222384, Atin-087787759977, Luviana-08164809844, Vivi-08168946404 , Qory-08572588972, Maksum 08234960750
Bekasi: Agus Tile-082136226346, Toyo-08981452842, Ganjar-085710631791, Cors-083897330818, Joyo-085711100472, Yoyok-085716115559, Habib-087741652599, Roganda-081318606225, Andre-087886146288
Subang: Alank-08588803009
Karawang: Hartoyo-085779815752, Rojak-08811923363
Tangerang: Reza-081386805839, Yahya-081316724952
Indramayu: Tayong-087717515189, Kholik-087828868837
Bandung: Boma-081320580389
Semarang: Afandy-08560412349
Yogyakarta: Akbar-08156815133, Yasri-082327277723, Azir-082325372670, Sugi-08179408659, Aldi-085228660064, Dhede-087739365431, Upit-085668353565
Solo: Qomar-087835380076, Gianto-081390027905
Madiun: Aris-085790333991
Surabaya: Samin-08175167345 Cahyo-085648654333, Pokemon-08385030093,
Samarinda: Castro-085242880100, Natalis-081253375407, Nalendro-085250800567, Yakub-085248776421, Tyas-085753314559, Marwono-085250825559, Dani-085393182282, Novitasari-087810804651, Broto-081346367956
Balikpapan: Zanuar-082151875815
Banjarmasin: Yoeyoen-085751524233
Makasar: Tamink-085242404599, Fajar-085242811042, Badar-085242444878 Fatur-085398085336
Sinjai: Dewi-089649588972, Subek-085224876494, Elqi-087842676406
Polman: Ridwan-095395336718
Majene: Sukri-081998169266
Pangkep: Rahmad-081998731317
Palu: Adin-085241171723
Morowali: Abul-085242676406
Sumbawa: Koplut-081935925028, Sam-085239967006
Kupang: Jeremi-081236256456
Ternate: Ama-081340570923, Tuti-0812195618864
Manokwari: Edi-081247763604
Jayapura: Baguma-082198240719
Papua: Sam Awom-081283973058